



---

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI BERKELANJUTAN  
MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN (AFTA)**

**I Gusti Agung Alit Suryawati  
Universitas Udayana**

---

**INFORMASI ARTIKEL**

**ABSTRAK**

---

*Dikirim : 16 November 2018  
Revisi pertama : 22 November 2018  
Diterima : 26 November 2018  
Tersedia online : 01 Desember 2018*

---

*Kata Kunci : Pariwisata Berkelanjutan,  
Tenaga Kerja Wisata, Pasar Bebas  
Asean*

---

*Email : [igaalitsuryawati@yahoo.co.id](mailto:igaalitsuryawati@yahoo.co.id)*

---

*Pasar bebas Asean sudah mulai tahun 2015 harus dijadikan tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Makalah ini mengkaji bagaimana strategi pengembangan pariwisata Bali berkelanjutan menghadapi pasar bebas Asean sejak 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan 10 informan yang berasal dari pengambil kebijakan, pengamat dan pelaku bisnis pariwisata di Bali. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan dua teori, yaitu teori hirarki kebutuhan dan teori stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata budaya telah menjadi sector andalan pembangunan daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat Bali. Keberlangsung pariwisata Bali ditopang oleh strategi keberlanjutan politik, ekonomi, keberlanjutan ekologis dan sosial-budaya masyarakat Bali. Disamping meningkatkan mutu layanan wisata, profesionalitas tenaga kerja pariwisata Bali juga perlu ditingkatkan agar mampu berperan dalam persaingan pasar bebas Asean mulai sejak tahun 2015.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan sumbangan yang besar bagi PDRB Bali. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang PDRB Bali sebesar 29,81%; disusul sektor pertanian 16,98%, sektor jasa 15,03%, dan sektor lainnya 38,18% (BPS Bali, triwulan II 2013).

Potensi wisata Bali terutama ditunjang oleh faktor tradisi dan kebudayaan hindu Bali, keindahan alam, serta faktor keramah-tamahan penduduknya yang memikat wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Perkembangan pariwisata di Bali juga ditunjang oleh adanya fasilitas jasa akomodasi, biro perjalanan, serta jasa layanan wisata lainnya yang memadai sesuai harapan wisatawan yang datang di Bali. Pelaku bisnis pariwisata Bali terus berupaya memberikan pelayanan wisata demi kepuasan konsumennya.

Selain pemberian layanan yang memuaskan konsumennya, pemerintah dan masyarakat Bali juga menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainability tourism development*), yakni dengan menerapkan falsafah *Tri Hita Karana* (THK), yakni selarasnya hubungan antar sesama manusia (*pawongan*), hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup (*palemahan*), serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*). Penegakan prinsip THK amat berarti bagi upaya pembangunan pariwisata budaya Bali yang berkelanjutan. Menurut I Wayan Ardika (2006:164), paradigma pariwisata budaya berkelanjutan meliputi: terpeliharanya mutu sumber daya alam dan budaya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal, dan terwujudnya kepuasan wisatawan.

Dinamika kepariwisataan Bali dewasa ini dihadapkan kepada pasar bebas Asean atau *Asean Free Trade Area* (AFTA) mulai tahun 2015. Menurut Departemen Perdagangan RI, pasar bebas Asean ini antara lain ditandai dengan terbukanya arus barang, modal dan jasa antar negara Asean. Tujuan AFTA adalah meliberalisasi arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing kawasan. Untuk arus barang dilakukan dengan pengurangan dan penghilangan hambatan tarif atau bea masuk, sedangkan arus modal dilakukan dengan deregulasi persetujuan penanaman modal. Selanjutnya untuk liberalisasi arus tenaga kerja, secara spesifik akan ada perjanjian arus bebas tenaga kerja terampil seperti perawat, akuntan, jasa arsitek, praktisi kedokteran, serta tenaga kerja sektor pariwisata (Anonim, 2012: 18). Untuk itu, upaya pengembangan pariwisata budaya Bali perlu langkah strategis agar pariwisata tetap menjadi berkah bagi masyarakat Bali.

Pasar bebas Asean yang mulai diterapkan pada tahun 2015 harus dijadikan tantangan sekaligus peluang untuk pengembangan pariwisata Bali yang berkelanjutan. Makalah ini akan membahas bagaimana strategi pengembangan pariwisata Bali berkelanjutan menghadapi pasar bebas Asean 2015?.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sangat digemari sejak jaman pemerintahan Belanda. Sejak jaman tersebut Bali mulai didatangi oleh orang asing. Mereka datang ada yang sebagai wisatawan dan juga sebagai pemerhati budaya.

Budaya Bali terkenal dengan keunikannya dan sudah dikenal sampai tingkat internasional, sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa Bali merupakan daerah pariwisata yang menonjolkan kebudayaannya. Melalui berbagai media Bali dipromosikan ke seluruh manca negara baik melalui media elektronik maupun dari cerita-cerita yang dibawa oleh wisatwan yang pernah datang ke Bali. Kekaguman para wisatawan asing akan Bali menggugah mereka untuk memberi gelar, istilah ataupun nama lain terhadap Bali seperti: *The Island of God*, *The Island of Paradise*, *The Island of Thousand Temples* dan lain sebagainya.

Sejak tahun 1930 Bali sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang mengarah pada kegiatan pariwisata. Terbukti dengan didirikannya salah satu sarana akomodasi di jantung kota Denpasar yang berupa hotel tempat menampung wisatawan yang berkunjung. Namun kegiatan pariwisata sempat terhenti akibat adanya perang dunia ke II antara tahun 1942-1945 yang kemudian disusul dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan hingga tahun 1949. Pertengahan tahun 50-an pariwisata Bali mulai tertata kembali dan pada tahun 1963 dibangun hotel Bali Beach (The Grand Bali Beach Hotel) di pantai Sanur dengan bangunan berlantai sepuluh. Hotel ini adalah satu-satunya hotel yang berbentuk bangunan tinggi sedangkan sarana hunian wisata lain yang berkembang hanyalah bangunan berlantai satu. Pada pertengahan tahun 70-an pemerintah daerah Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur ketinggian bangunan maksimal 15 meter. Penetapan ini ditentukan dengan mempertimbangkan faktor budaya dan tata ruang tradisional Bali sehingga Bali tetap memiliki nilai-nilai budaya. Sejak dioperasikannya hotel Bali Beach tersebut, pembangunan sarana hunian wisata berkembang pesat. Dari segi kualitas Sanur berkembang relatif lebih terencana karena berdampingan dengan hotel Bali Beach, sedangkan kawasan Pantai Kuta berkembang secara alamiah termasuk kawasan Ubud, Gianyar yang menonjolkan wisata pedesaan. Diikuti dengan pembangunan sarana hunian wisata di Nusa dua serta di daerah-daerah lain seperti kawasan Badung, Denpasar maupun Gianyar.

Sebagai akibat dari perkembangan kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang pariwisata mulai didirikan seperti restoran, artshop, pasar seni, pusat hiburan dan tempat rekreasi mulai tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek wisata. Sehingga para wisatawan memiliki berbagai pilihan dalam menikmati liburan mereka di Bali. Hunian wisata merupakan salah satu sarana akomodasi dalam sektor pariwisata dan sarana akomodasi tersebut merupakan industri yang menggerakkan pariwisata di Bali. Industri pariwisata adalah salah satu faktor penting yang memegang peranan dalam memajukan pariwisata di Bali. Sejak tahun 90-an sampai sekarang Bali sudah mengalami perubahan yang sangat cepat.

Pembangunan sarana hunian wisata yang berkelas internasional akhirnya dimulai dengan pengembangan kawasan Nusa Dua menjadi resort wisata internasional. Dikelola oleh Bali Tourism Development Corporation, suatu badan bentukan pemerintah, kawasan Nusa Dua dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata bertaraf internasional. Beberapa operator hotel masuk kawasan Nusa Dua sebagai investor yang pada akhirnya kawasan ini mampu mendongkrak perkembangan pariwisata Bali.

Masa-masa berikutnya, sarana hunian wisata lalu tumbuh dengan sangat pesat di pusat hunian wisata terutama di daerah Badung, Denpasar, Gianyar, Kawasan Pantai Kuta, Jimbaran, Ungasan menjadi kawasan hunian wisata di Kabupaten Badung, Sanur, dan pusat kota untuk kawasan Denpasar. Ubud, Kedewatan, Payangan, dan Tegalalang menjadi pengembangan hunian wisata di daerah Gianyar.

Mengendalikan perkembangan yang amat pesat tersebut, pemerintah Daerah Bali kemudian menetapkan 15 kawasan di Bali sebagai daerah hunian wisata berikut sarana penunjangnya seperti restoran dan pusat perbelanjaan. Hingga kini, Bali memiliki lebih dari 35.000 kamar hotel terdiri dari kelas Pondok Wisata, Melati, hingga Bintang 5. Sarana hotel-hotel tersebut tampil dalam berbagai variasi bentuk mulai dari model rumah, standar hotel, villa, bungalow, dengan variasi harga jual. Keberagaman ini memberi nilai lebih bagi Bali karena menawarkan banyak pilihan kepada para wisatawan.

Sebagai akibat dari perkembangan kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang seperti misalnya: restoran, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan dan rekreasi tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek wisata. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali, akhirnya memiliki banyak pilihan dalam menikmati liburan mereka di Bali, akhirnya organisasi kepariwisataan seperti PHRI (IHRA), ASITA dan lembaga kepariwisataan lain di Bali, yang secara professional mengelola dan memberi layanan jasa pariwisata, seakan memberi jaminan untuk kenyamanan berwisata di Bali (Anonim, 2008).

Pesatnya pertumbuhan pembangunan untuk kepentingan perumahan dan industri pariwisata, hotel, villa. Bungalow dan sarana kegiatan olah raga air di hampir semua kawasan pesisir di Bali telah mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, sumber daya alam (air, udara, dan tanah), dan ekosistem yang ada disekitarnya (Anonim, 2008).

Kehidupan sosial budaya masyarakat sudah semakin terkikis seiring dengan derasnya laju pembangunan pariwisata. Budaya-budaya asli (*indigenous culture*) masyarakat yang hidup di sepanjang pesisir hampir seluruh pelosok Bali seperti nelayan, pembuat garam, pencari kerang dan batu karang, serta petani rumput laut sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap kurang menjanjikan kesejahteraan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari manisnya kata “pariwisata” yang beriming-iming dollar. Namun tanpa mereka sadari bahwa pariwisata secara perlahan telah merubah pola, gaya, dan perilaku hidupnya sehingga seringkali terjerumus ke dalam “noda hitam” pariwisata.

Ada anggapan bahwa pariwisata Bali telah berada pada titik stagnasi dapat kita lihat dari indikator tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali yang cenderung menunjukkan angka yang stagnan bahkan beberapa tahun sebelumnya sempat menurun. Para praktisi pariwisata dan juga pemerintah daerah rupanya juga telah mengetahuinya. Namun sayang, kebijakan yang diambil masih terlihat bersifat sementara dan kurang menyeluruh untuk pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Sebut saja misalnya, praktisi hotel di Bali cenderung mengobrol harga kamarnya ketimbang penyelamatan kualitas destinasi pariwisata ke depan. Kita bisa bayangkan, karena masih banyak sumber daya yang digunakan pada dunia perhotelan masih disubsidi. Sebut saja misalnya energi listrik, air dan juga tenaga kerja

yang harus rela bekerja lebih keras karena tamu meningkat oleh sebab kamar diobral namun gaji tidak terlalu banyak bertambah. Lebih parah lagi jika wisatawan diarahkan hanya tinggal di hotel, sehingga kontak dengan obyek wisata dan juga masyarakat lokal akan berkurang. Akhirnya dampak pengganda untuk ekonomi masyarakat lokal akan dirasakan sangat kecil. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kita berada pada titik kebingungan dan cenderung mengambil kebijakan yang bersifat sesaat (Utama, 2008).

Meningkatnya kualitas destinasi haruslah dilakukan sebagai usaha menyeluruh bagi semua elemen produk wisata, dari transportasi, hotel, restoran, objek wisata dan tentu juga pelayanan yang baik kepada wisatawan. Kalau wisatawan merasa takut melakukan perjalanan ke Bali dengan alasan keselamatan penumpang tidak terjamin, artinya kita harus meningkatkan kualitas transportasi yang ada. Kalau hotel sepi wisatawan ini merupakan efek domino dari persoalan yang lain karena wisatawan datang ke Bali tidak hanya untuk tinggal di hotel saja. Bagaimana wisatawan mau datang ke Bali jika obyek wisata dan komponen lainnya tidak sesuai dengan harapan wisatawan. Taman kota yang tidak terawat dan langkanya ruang hijau terbuka juga memperburuk kesan kota (Utama, 2008).

Menurut Batur et. al. (2001) dalam Anonim (2006), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor, dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi.

#### 1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

#### 2. Keikutsertaan Para Pelaku (*stakeholder involvement*)

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan wisata.

#### 3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterlibatan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

#### 4. Penggunaan Sumber Daya secara Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

#### 5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

#### 6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alam, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara regular sehingga dapat ditentukan penyesuaian perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas pariwisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limit of acceptable use*).

#### 7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional, dan lokal.

#### 8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberikan perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti: tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

#### 9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan professional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

#### 10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat *karakter landscape, sense of place* dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut

seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam membangun pariwisata Bali di masa depan agar tetap berkelanjutan, dimana secara umum makna keberlanjutan adalah bahwa Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995 dalam Anonim, 2006).

Menurut WTO dalam Ika Kusuma Permana Sari, (2006) menyebutkan bahwa keberlanjutan pariwisata harus memperhatikan 3 hal pokok (*triple bottom line principles*), yaitu:

1. keberlanjutan lingkungan/ekologis (*ecological sustainability*)
2. keberlanjutan sosial budaya (*social and culture sustainability*)
3. keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) bukan saja untuk generasi yang sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Selain itu, The World Commission on Environment and Development (WCED), 1987 memberikan batasan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak boleh melakukan penghancuran terhadap berbagai sumber daya, sehingga kesejahteraan generai-generasi yang akan datang tetap terjamin.

Dalam Anonim (2008), untuk itu ada hal-hal penting untuk dijadikan rujukan pengembangan sektor wisata di masa depan, yaitu antara lain:

1. Harus ada tekad bersama untuk membenahi obyek-obyek wisata dari stakeholder yang berkepentingan dalam dunia pariwisata,
2. Perlu adanya tekad bersama untuk mewujudkan pandangan bahwa pariwisata dapat mensejahterakan masyarakat local,
3. Infrastruktur menuju obyek-obyek wisata dibangun dan dirawat untuk kemudahan aksesibilitas pariwisata.

Dengan kondisi Bali yang dilihat dari segi pariwisata tidak mengalami pemerataan kesejahteraan yang terbukti di daerah kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar yang memiliki sarana akomodasi yang cukup banyak sehingga meningkatkan pendapatan daerahnya padahal kita ketahui bersama obyek-obyek wisata banyak terdapat di daerah selain ketiga daerah tersebut. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pariwisata hendaknya dilakukan penataan tata ruang yang matang sehingga mampu pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah yang ada di Bali terutama pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata (Minca Caludio, 2000).

Maka oleh karena itu perlu adanya pemetaan-pemetaan atau mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di Bali menjadi wilayah yang cukup matang dan kuat nilai-nilai eksotik yang ditawarkan tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang dimiliki. Untuk daerah wisata yang sudah terlanjur bercampur

dengan budaya luar yang telah beradaptasi disana maka dipetakanlah ruang-ruang tersebut sebagai daya tarik tersendiri.

Sebagai contoh Kuta yang sudah mulai kehilangan nilai-nilai eksotik dari pantainya karena menjamurnya hotel-hotel di pinggir pantai, dunia malam disana yang penuh dengan diskotik dan hingar bingar musik dan cahaya-cahaya lampu yang berkelilauan dimana-mana sehingga tidak tampak pemandangan Kuta yang aslinya. Dan daerah tersebut bisa dijadikan tempat wisata yang memiliki daya tarik yang berbeda dengan Bali pada aslinya.

Tempat wisata lain yang belum mengalami pengembangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan perlu direncanakan terlebih dahulu pengembangannya sehingga tidak merusak tata ruang yang ada disana dan tidak menghilangkan unsur-unsur estetika dan eksotik dari wilayah tersebut. Daerah tujuan wisata tersebut akan menjadi obyek wisata yang berkembang dengan baik sesuai dengan tata ruang yang telah dipetakan sehingga menjadi daerah wisata yang berkelanjutan.

Jika terdapat daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan ekowisata, wisata bahari, wisata agro, wisata pedesaan dan lain sebagainya agar tetap memegang prinsip-prinsip wisata berkelanjutan serta mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh daerah yang ada di Bali sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kajian ini diterapkan metode kualitatif berperspektif kajian budaya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan studi dokumen, serta wawancara mendalam dengan 10 informan yang berasal dari pengambil kebijakan, pengamat dan pelaku bisnis pariwisata di Bali. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan dua teori, yaitu teori hirarki kebutuhan dan teori *stakeholder*.

## **PEMBAHASAN**

### **Strategi Pengembangan Pariwisata Bali Yang Berkelanjutan**

Dalam menghadapi pasar bebas Asean sejak 2015 diperlukan langkah-langkah strategis agar pariwisata budaya Bali terus berlanjut. Pengembangan pariwisata Bali perlu didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang meliputi: (a) menjamin pemerataan dan keadilan sosial, (b) menghargai keanekaragaman (*diversity*), (c) menggunakan pendekatan integratif, dan (d) berperspektif jangka panjang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga mencakup dua gagasan penting, yaitu gagasan kebutuhan esensial demi keberlanjutan hidup manusia serta gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini dan masa depan. Untuk memenuhi dua gagasan tersebut diperlukan beberapa strategi yaitu strategi politik, ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keberlanjutan sosial dan budaya (Suma Tjahja Djajadiningrat, 2001).



### **Strategi Politik Pariwisata Bali**

Strategi politik pengembangan pariwisata Bali secara umum dapat dinyatakan ke dalam slogan: “pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”. Artinya pariwisata harus dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat Bali, dan bukan sebaliknya Bali menjadi korban atas pariwisata itu sendiri. Nampaknya prinsip politis ini tetap dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan dan *stakeholders* pelaku bisnis pariwisata Bali. Segegap pihak terus menjalankan berbagai upaya untuk menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, tetap menjadikan Bali sebagai pulau surga (*paradise island*) yang aman, nyaman dan damai.

Bali harus tetap aman dan nyaman agar kehidupan pariwisata terus berkembang. Masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata Bali tidak menghendaki adanya kekacauan di Bali seperti serangan biadab teroris dua kali di WTC (*World Tourism Centre*) Kuta tahun 2002 dan 2005. Serangan teroris ini telah memporakporandakan dunia kepariwisataan Bali. Beberapa negara mengeluarkan *travel warning* agar warga negaranya tidak mengunjungi Indonesia, khususnya Bali karena dianggap tidak aman. Kedua peristiwa bom Bali (2002 dan 2005) tersebut telah berakibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali.

Beberapa bulan pasca teror bom tahun 2002 dan 2005, aktivitas perekonomian orang Bali menurun drastis. Hasil survei di 45 desa adat penyangga pariwisata memperlihatkan bahwa peristiwa bom Bali 2002 telah menurunkan pendapatan di berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertanian menurun 20%-70%, industri dan kerajinan menurun 20%-100%, perdagangan menurun 20%-50%, dan transportasi umum menurun 10%-35% (Emiliana Mariyah, 2007:6-7).

Belajar dari kedua peristiwa terorisme di atas, maka faktor keamanan menjadi penting karena terkait langsung dengan kenyamanan wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali. Faktor keamanan menjadi bagian dari modal utama denyut pariwisata Bali. Untuk itu, segala bentuk kerusakan, terutama terorisme perlu diantisipasi dalam keberlangsungan pariwisata Bali. Tanpa keamanan yang memadai, industri pariwisata akan rontok dan kebudayaan tidak akan berkembang semestinya. Solusi untuk menjamin “keamanan” dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung di Bali menjadi faktor penting dalam upaya pengelolaan citra positif pariwisata budaya Bali (Darma Putra, 2006: 327-328).

### **Strategi Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Bali**

Disamping sebagai sumber devisa negara yang tahan krisis, upaya pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, strategi pembangunan pariwisata adalah memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Disamping dapat menggairahkan kehidupan seni-budaya Bali, sektor pariwisata telah berpengaruh terhadap berkembangnya lapangan pekerjaan/aneka usaha, baik usaha yang terkait langsung dengan aktivitas pariwisata (termasuk usaha jasa akomodasi, travel, *artshop*, souvenir) maupun usaha pendukung pariwisata termasuk usaha kerajinan rakyat, produk pertanian, peternakan dan lain-lain. Pariwisata telah menjadi berkah ekonomi bagi masyarakat Bali hingga saat ini.

Masyarakat Bali harus memperoleh pembagian kue pariwisata yang semestinya sehingga kesejahteraan sosial-ekonomi mereka terjamin. Sebanyak 80% dari 3,9 juta

penduduk Bali kehidupannya tergantung dari pariwisata. Terbukti, perekonomian provinsi Bali yang ditunjang oleh sektor pariwisata juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menyerap tenaga kerja yang ada. Namun, sebagian besar pekerja Bali masih berpendidikan rendah. Sampai Februari 2014, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 42,18%, sedangkan pekerja dengan pendidikan SMP sebanyak 15,16% dan pekerja dengan pendidikan SMA ke atas sebanyak 42,66% (BPS Bali, Februari 2014).

Mayoritas pekerja Bali yang berpendidikan rendah tersebut tentu menjadi persoalan tersendiri apabila ingin bersaing dengan tenaga kerja negara-negara Asean lainnya. Dalam menghadapi AFTA 2015, maka paket-paket pelatihan untuk peningkatan *skill* tenaga kerja pariwisata di Bali mutlak diperlukan.

### **Strategi Keberlanjutan Ekologis**

Pengembangan pariwisata di Bali juga perlu ditopang dengan strategi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan (ekologis) setempat. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Pariwisata (WTO) yang menyatakan bahwa: "Pariwisata, faktor pembangunan berkelanjutan "(Pasal 3; Majelis Umum WTO, 1999). Pada regulasi lokal Bali "Perda 3 Tahun 1991" dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya yang lingkungan ramah dan didasarkan pada filosofi Bali *Tri Hita Karana* (THK) dan ini sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Hindu (Peraturan Provinsi Bali, Perda Provinsi Bali No 3, 1991).

Prinsip *THK* menjadi dasar dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata di Bali yang mengedepankan keseimbangan antara manusia dengan sesamanya (*pawongan*), keseimbangan manusia dengan lingkungannya (*palemahan*) dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (*Parahyangan*) (Mantra, 1996: 26). Sesuai dengan prinsip *THK*, pemerintah dan masyarakat Bali telah memberikan perhatian kepada upaya pelestarian lingkungan (*palemahan*) dan mengembangkan partisipasi masyarakat (*pawongan*) setempat untuk mendukung terciptanya kehidupan pariwisata yang kondusif. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholders* yang menjunjung tinggi prinsip *triple bottom line reporting* yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) bahwa upaya realisasi dari tanggungjawab social merupakan pengungkapan (*disclosure*) terhadap aspek ekonomi (*economic*), lingkungan (*environmental*), dan sosial (*social*). Implementasi *triple bottom line* menjadi cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada *stakeholder* (Murtanto, 2005: 4).

Upaya menjaga pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya *stakeholders* di Bali dalam mempertahankan kawasan wisata setempat yang asri. Dalam kaitan ini, diterapkan prinsip *go green*, yakni upaya menerapkan teknologi yang ramah lingkungan untuk menjaga keasrian lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Pariwisata (WTO) yang menyatakan bahwa: "Pariwisata, faktor pembangunan berkelanjutan "(Pasal 3; Majelis Umum WTO, 1999). Menurut Ardika (dalam Prasiasa, 2013: 160), pariwisata kerakyatan berkelanjutan tersebut memiliki pilar kualitas, kontinuitas dan keseimbangan yang menyelaraskan kebutuhan masyarakat lokal, kelestarian sumber daya (fisik dan budaya) dan kepuasan wisatawan.

Pengembangan pariwisata di Bali memang perlu berorientasi kepada upaya pelestarian lingkungan hidup (ekologis) dan penguatan sosial-budaya setempat. Dalam kaitan ini, maka prinsip *THK* bisa diterapkan untuk menunjang pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang menjamin: (1) kelangsungan ekologis, (2) kelangsungan sosial-budaya, dan (3) kelangsungan ekonomi (I Putu Anom, 2010: 5).

### **Strategi Keberlangsungan Sosial-budaya Masyarakat Bali**

Orientasi pembangunan pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1991, pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan Bali (yang dijiwai oleh Agama Hindu) sebagai bagian kebudayaan nasional yang berdasarkan Pancasila. Setiap langkah dan gerak dalam kerangka pengembangan pariwisata secara normatif diharapkan tetap bertumpu pada kebudayaan Bali.

Sesuai dengan Perda No.3 Tahun 1991 di atas, maka pembangunan pariwisata di Bali diharapkan tetap menonjolkan aspek budaya Bali sekaligus mampu menjaga keberlangsungan budaya masyarakat Bali. Pariwisata budaya Bali yang dikembangkan adalah pariwisata berwawasan budaya yang mengedepankan nilai religius, harmoni, kebersamaan, keseimbangan dengan bersandar pada cipta, rasa, karsa dan berbagai kearifan untuk menumbuhkan iklim keteraturan, kedamaian, dan kreatifitas dan ketertiban kosmos. Pengembangan pariwisata budaya Bali tersebut juga mencakup dimensi fisik, non fisik (sebagai *input*) dan keadaan yang sinergis, dinamis, terbuka, dan menjunjung tinggi kearifan budaya lokal (sebagai *output*). Upaya pencapaian untuk menuju kepada cita-cita pembangunan berwawasan budaya itu, dilakukan dengan pendekatan dialogis, partisipatif, obyektif dan etis. Hasil yang hendak dicapai (aksiologi) dalam pembangunan pariwisata berwawasan budaya ini meliputi: a) tercapainya kesejahteraan yang merata; b) teraktualisasinya *tri hita karana* dan terjaganya kualitas lingkungan (I Wayan Geria, 2002:43).

Upaya penguatan dan pemberdayaan potensi budaya lokal untuk menunjang pariwisata daerah menjadi semakin penting. Dalam kaitan ini, munculnya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan bukti keseriusan bangsa ini untuk lebih memberdayakan potensi budaya masyarakat daerah (kabupaten/kota). Pemberdayaan masyarakat lokal berarti juga upaya menggali dan lebih memberdayakan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, strategi budaya diperlukan untuk menghadapi pengaruh budaya luar. Benteng ketahanan budaya Bali perlu terus diperkuat agar orang Bali tak kehilangan kebalikannya.

Selain budaya Nusantara, masyarakat Bali kini juga dihadapkan kepada pengaruh budaya global yang masuk melalui pintu kegiatan pariwisata. Di era pasar bebas Asean mulai 2015, tentu interaksi sosial dan kontak budaya global yang berlangsung dalam kehidupan pariwisata akan semakin intens, sehingga muncul fenomena dialog dan percampuran antara budaya global dan budaya lokal yang kemudian membentuk glokalisasi. Sejauh ini glokalisasi belum menghapus keberadaan budaya lokal, tetapi justru memperkaya dan memperkuat budaya lokal Bali.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sektor pariwisata budaya Bali telah menjadi sektor andalan pembangunan daerah yang mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja dan mendukung upaya mensejahterakan masyarakat Bali. Beberapa strategi yang menjamin keberlangsungan pariwisata Bali adalah strategi yang mendukung keberlanjutan politik dan keamanan yang mendukung kenyamanan wisatawan, keberlanjutan ekonomi masyarakat Bali, keberlanjutan lingkungan (ekologis), serta keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat Bali.

### Saran

Pasar bebas Asean yang mulai diberlakukan tahun sejak tahun 2015 terjadi persaingan bebas baik di bidang jasa maupun produk layanan yang terkait dengan pariwisata. Untuk itu, disamping terus meningkatkan mutu layanan wisata, profesionalitas tenaga kerja pariwisata Bali juga perlu ditingkatkan agar mereka siap menjadi “pemain” dalam persaingan pasar bebas Asean mulai sejak tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I Putu. 2010. “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan”, dalam *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, editor Baiquni dkk. Denpasar: Universitas Udayana.
- Anonim, 2006. *Pariwisata berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*.
- Anonim. 2008. *Bali dan Pariwisata*. <http://www.baliprov.go.id>.
- Anonim. 2012. *Menuju Asean Economic Community 2015*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Ardika, I Wayan. 2006. *Pengelolaan Pusaka Budaya sebagai Obyek dan Daya Tarik Pariwisata Bali (dalam Bali Bangkit Kembali)*. Denpasar: Departemen Kebudayaan dan pariwisata RI dan Universitas Udayana. BPS Provinsi Bali Bali, triwulan II 2013
- Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2001. *Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan, Aksara Buana, Bandung*.
- Geria, I Wayan. 2002. *Konsep Payung Pembangunan Kota Denpasar Yang Berwawasan Budaya*, dalam *Konsep Dasar Pembangunan Kota Denpasar Yang Berwawasan Budaya* (I Wayan Gheria, editor). Denpasar: Bappeda Kota Denpasar 2002.
- Laporan BPS Provinsi Bali, triwulan II 2013
- Majelis Umum dari Kode (1999) WTO Organisasi Pariwisata Dunia Global Etik Pariwisata.
- Mariyah. Prof Dr. Emiliana, MS. 2007. *Potensi dan Kendala Pengembangan Pariwisata Budaya Di Bali*. Denpasar: Makalah lepas.
- Minca, Claudio. 2000. *Bali Syndrome: Explosion and Implosion of Exotic Tourist Spaces*. *Tourism Geographies* 2 (4)
- Murtanto. 2005. *Alat Evaluasi Pengendalian Internal untuk Bisnis*. Hecca Publishing. Jakarta Indonesia.

- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika
- Putra, Darma. 2006. Polusi dan solusi dalam Pembangunan Bali 1966-2006: Kebudayaan Diantara Pariwisata, Demokratisasi dan Terorisme (dalam *Bali Bangkit Kembali*). Denpasar: Departemen Kebudayaan dan pariwisata RI dan Universitas Udayana.
- Sari, Ika Kusuma Permana. 2006. *Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pariwisata Berbasis Kerakyatan*. Jurnal Kepariwisata Indonesia, Volume I No. 2.
- Utama, IGB Rai. 2008. *Stagnasi Pariwisata Bali*. <http://www.kpubali.wordpress.com>.